

DETERMINAN KINERJA PEMERINTAH DESA SIDOBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

Lailatul Mafruhah¹, Siti Sundari²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
sitisundari.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh akuntabilitas, kompetensi, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa Sidobinangun, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini mengambil data melalui kuisioner yang dibagikan untuk masyarakat Desa Sidobinangun. Studi ini memakai analisis berupa model *partial least square* (PLS). Simpulan, bahwa kinerja pemerintah desa Sidobinangun sangat membutuhkan tingkat akuntabilitas, kompetensi yang tinggi dari aparatur desa Sidobinangun dan juga didukung oleh tingginya peran masyarakat Sidobinangun, namun pengendalian internal belum memiliki kontribusi yang optimal terhadap kinerja pemerintah desa Sidobinangun.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kompetensi, Pengendalian Internal

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of accountability, competence, internal control and community participation on the performance of the Sidobinangun village government, Deket District, Lamongan Regency. This research collected data through questionnaires distributed to the people of Sidobinangun Village. This study uses analysis in the form of a partial least squares (PLS) model. The conclusion is that the performance of the Sidobinangun village government really requires a high level of accountability and competence from the Sidobinangun village apparatus and is also supported by the high role of the Sidobinangun community, but internal control has not yet had an optimal contribution to the performance of the Sidobinangun village government.

Keywords: *Accountability, Competence, Internal Control*

PENDAHULUAN

Keberhasilan sebuah desa tergantung pada kinerja para aparatur pemerintah desa, sehingga lingkungan desa dapat mengevaluasi efektifitas aparat desa (Putra, 2013). Strategi otonomi daerah bertujuan mendukung pengembangan kemampuan pemerintah desa untuk menyediakan pelayanan bagi publik dengan lebih efektif serta efisien. Kedekatan lembaga pemerintah di tingkat desa diharap dapat mencukupi kebutuhan publik akan pelayanan yang baik. Perencanaan pembangunan pemerintah desa baik program maupun anggaran perlu dilaksanakan dengan baik agar tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan nyata publik dengan perencanaan pembangunan. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan Pemerintahan Desa relevan dengan Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 6 Tahun 2004 mempunyai konsekuensi strategis, dalam hal ini dikarenakan desentralisasi politik serta keuangan sudah memberikan

kekuasaan yang lebih tinggi kepada penduduk desa untuk mengarahkan kegiatan organisasi Pemerintahan Desa dengan menetapkan kebijakan, tujuan, dan program. Proses perencanaan pembangunan desa perlu diperhatikan hal-hal seperti kualitas pejabat terpilih, ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia ataupun keuangan. Penilaian kinerja dalam hal ini diperlukan untuk menilai sejauh mana rencana anggaran mencapai target yang ditentukan (Ramandei, 2009).

Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa menegaskan pentingnya kinerja pemerintahan desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi desa yakni dengan melihat potensi daerah, keragaman daerah, tantangan kompetisi global dalam satu kesatuan sistem pelaksanaan pemerintahan desa, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Keberhasilan pemerintah desa juga perlu ditentukan oleh kinerjanya sebab berstatus nirlaba. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berpihak pada rakyat secara efektif diharapkan dapat dihasilkan dari implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan prinsip akuntabilitas pada manajemen keuangan.

Kinerja pemerintah daerah diperkirakan akan meningkat dengan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Binawati et al, 2015). Desa Sidobinangun, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan yakni salah satu desa yang dalam menyusun Pendapatan Asli Desa dari tahun 2017 sampai tahun 2022 terdapat penurunan, sehingga Desa Sidobinangun dipilih menjadi objek penelitian yang akan dilaksanakan. Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sidobinangun tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, menurut ungkapan aparat desa Sidobinangun, hal itu dikarenakan pada tahun tersebut terdapat lahan yang tidak ada publik yang menyewa dan juga terdapat beberapa lahan yang masa sewanya sudah habis kemudian tidak ada yang meneruskan menyewanya lagi. Pendapatan transfer selama 6 tahun berturut dari dana bantuan keuangan pemerintah semakin tahun semakin meningkat. Apabila ditinjau dari perealisasi APBDes tersebut, dapat dilihat bahwa ketergantungan dana oleh pemerintah desa kepada pemerintah pusat masih begitu tinggi, diindikasikan melalui masih tingginya pendapatan transfer dari pemerintah dibandingkan dengan pendapatan asli desa.

Tabel 1.
APBDes Desa Sidobinangun

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer Dari Pemerintah
2017	221.858.050	1.136.007.200
2018	185.000.000	1.032.457.072
2019	121.000.000	1.141.855.300
2020	106.800.000	1.344.959.600
2021	100.000.000	1.409.475.000
2022	80.000.000	1.693.692.000

Sumber: Realisasi APBDes Desa Sidobinangun 2017-2022

Rendahnya kemampuan pemerintah Desa Sidobinangun untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa dapat dilihat dari jumlah pendapatan desa yang menurun dari tahun ke tahun dibandingkan dengan pendapatan transfer. Pendapatan Asli Desa pada Desa Sidobinangun dari 6 tahun berturut semakin menurun dikarenakan pada

tahun 2018 dan 2022 terdapat salah satu lahan yang tidak ada yang menyewa pada tahun tersebut. Pendapatan Asli Desa kecil menunjukkan adanya kecenderungan masih kurangnya kemampuan dan usaha desa untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan yang ada. Hal ini menunjukkan tidak optimalnya kinerja pemerintah desa.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa, diantaranya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Jitmau dalam (Jatmiko, 2020) menyatakan bahwa Kinerja instansi pemerintah itu berkaitan erat dengan akuntabilitas. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu rangkaian sistematis dari berbagai kegiatan, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, klasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014). Kompetensi perangkat desa merupakan aspek lain yang juga mempengaruhi kinerja. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2016). Perangkat desa harus memiliki kompetensi kerja yang diperlukan, untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem pengendalian internal merupakan faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah Desa..

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat, individu, atau kelompok dalam inisiatif pembangunan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang menganut prinsip good governance, maka masyarakat desa dituntut untuk bergantung pada pengelolaan uang desa dan perumusan kebijakan. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pengelolaan dana desa dan perumusan kebijakan keuangan desa akan membantu pemerintah daerah menetapkan peraturan keuangan yang relevan dan memastikan bahwa pengambilan keputusan bukan semata-mata bergantung kepada pemerintah. Terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, antara lain akuntabilitas. Akuntabilitas yakni konsep berkenaan dengan prosedur mempertanggung jawabkan oleh setiap pihak. Jitmau dalam (Jatmiko, 2020) memaparkan bahwa Kinerja instansi pemerintah tersebut erat kaitannya dengan akuntabilitas. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian disingkat menjadi SAKIP ialah sebuah rangkaian struktural dari beragam kegiatan, media, dan mekanisme yang dibuat bagi tujuan pengukuran dan penetapan, penghimpunan data, pengklasifikasian, ikhtisar, serta pelaporan kinerja (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014). Kompetensi aparat desa yakni aspek lain yang juga mempengaruhi kinerja. Kompetensi ialah sebuah kemampuan dalam melakukan sebuah tugas atau pekerjaan yang dilandaskan oleh keterampilan serta wawasan dan diperkuat oleh sikap kerja yang diberi tuntutan oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2016). Aparat desa perlu mempunyai kompetensi kerja yang diperlukan, demi menambah kinerja dalam menyediakan pelayanan bagi publik.

Sistem pengendalian internal yakni faktor lainnya yang memberikan pengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa. Sistem pengendalian internal ialah sebuah proses integral dari perilaku dan aktivitas yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pimpinan serta semua karyawan dalam memberikan kepercayaan yang wajar dalam perealisasi tujuan organisasi lewat kegiatan yang efektif serta efisien, keakuratan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap regulasi

perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008). Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa yakni partisipasi penduduk desa. Partisipasi ialah keikutsertaan publik, individu, atau kelompok dalam inisiatif pembangunan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang menganut prinsip good governance, maka penduduk desa didesak untuk bergantung pada pengelolaan uang desa dan perumusan kebijakan. Keterlibatan partisipasi publik dalam semua tahapan manajemen dana desa serta perumusan kebijakan keuangan desa dapat mendukung pemerintah daerah menetapkan peraturan keuangan yang relevan dan memastikan bahwa pengambilan keputusan bukan semata-mata bergantung kepada pemerintah. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang kinerja pemerintah, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan pada variabel, objek, populasi dan sampel.

KAJIAN TEORI

Kinerja Pemerintah Desa

Menurut Wibowo (2016:17), kinerja dapat didefinisikan sebagai tindakan ataupun prestasi (performance). Pada konteks tertentu, kinerja didefinisikan sebagai output dari seorang karyawan, proses manajemen output, ataupun organisasi secara kompleks, di mana output dari proses itu perlu ditunjukkan dengan bukti nyata dan bisa dinilai melalui perbandingan dengan standar yang sudah ditetapkan, sedangkan (Widodo, 2015) mengartikan kinerja sebagai hasil kerja yang bisa diraih oleh seorang individu ataupun sebuah kelompok pada sebuah organisasi yang sejalan dengan wewenang serta tanggung jawab setiap bagian guna mewujudkan sebuah tujuan tertentu.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Akuntabilitas ialah jenis tanggung jawab dalam mempertanggung jawabkan kesuksesan ataupun kegagalan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan serta sasaran yang sudah ditentukan lewat saluran pertanggung jawaban secara teratur. Dipaparkan oleh (Rizal, 2019), eksistensi pemerintah desa sebagai entitas yang bisa dipercaya serta mampu melakukan pertanggungjawaban keuangan kepada publik dalam bentuk pelaporan keuangan yang bertanggung jawab dan transparan disebut sebagai *stewardship theory*. Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2021) ialah tanggungjawab bagi pihak yang memberi amanah dalam memberi pertanggungjawaban, menyediakan, dan menyampaikan setiap aktivitas dan kegiatan yang merupakan tanggungjawabnya pada pihak yang memberi amanah (*principal*) yang mempunyai hak dan wewenang dalam memperoleh pertanggungjawaban tersebut. Kinerja pemerintah desa bisa dinilai baik jika semua rencana yang disusun oleh pemerintah demi memaksimalkan hasil dari rencana tersebut, salah satunya pertanggung jawaban kinerja serta manajemen keuangan desa, sudah dilaksanakan dengan benar dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Dipaparkan oleh Elkha dan Wahidawati (2020), Putra et al., (2018), dan Damayanti (2018), akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Kompetensi yakni kombinasi wawasan serta kemampuan yang sesuai dengan tugas serta kapasitas dalam menanggulangi sebuah pekerjaan ataupun tugas merujuk pada sebuah standar yang sudah ditentukan. Kompetensi secara umum didefinisikan

sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Dalam konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah “kompetensi” merujuk pada atribut ataupun karakteristik seorang individu yang menyebabkan berhasilnya pekerjaan. *Stewardship theory* mengacu pada keberadaan pemerintah desa sebagai sebuah lembaga daerah yang bisa menyediakan pelayanan yang baik bagi publik, dalam hal ini diperlukan sumber daya manusia yang baik serta kompeten sehingga kemakmuran publik bisa terwujud dengan optimal (Haryanti, 2016). Kompetensi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa secara langsung dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Kompetensi ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan mengembangkan kinerja sebagai upaya menyediakan pelayanan bagi publik. Hal ini relevan dengan hasil penelitian Muallifu et al., (2019), Utama (2020) Hermawan, (2019) bahwa Kompetensi aparat desa memberi pengaruh yang positif serta signifikan pada kinerja pemerintah desa.

H2 : Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa Sidobinangun

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Stewardship theory menggambarkan keadaan aparat desa yang tidak didorong oleh tujuan pribadi namun lebih terfokus pada tujuan hasil utama demi kepentingan publik dan mengikuti hukum, dalam hal ini Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem, yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern yakni proses integral dari tindakan serta kegiatan. Efektivitas pemerintahan desa dipengaruhi oleh pengendalian internal sebab pengendalian internal dapat berdampak pada pengambilan keputusan internal yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas pemerintahan desa dan hasil pengambilan keputusan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Elkha & Wahidawati (2020) yang menemukan bahwa pengendalian intern meningkatkan fungsi pemerintahan desa secara signifikan

H3 : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa Sidobinangun

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Setiap orang mempunyai suara dalam penentuan keputusan melalui partisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, lewat penggunaan lembaga yang sah yang mewakili kepentingannya. Dalam penelitian ini, kedua pihak yang dimaksud ialah pemerintah desa dan penduduk desa yang bekerjasama demi mewujudkan tujuan, yakni kesejahteraan dan keberhasilan bersama. Individu yang menerapkan *Stewardship theory* mempunyai hubungan kesepakatan dengan organisasinya yang merepresentasikan komitmen moral serta mengikat masing-masing pihak agar bekerja mencapai tujuan bersama dengan tidak saling menguntungkan (Raharjo, 2014). "Berpartisipasi" dalam penentuan keputusan yang demokratis, mengakui hak asasi manusia, memungkinkan kebebasan berbicara dan pers, dan menerima atau mengakomodasi ambisi orang ialah contoh partisipasi. Intinya, keterlibatan publik sangat penting untuk membangun kerangka kerja yang lebih adil, partisipatif, dan akuntabel serta dalam membangun kembali keyakinan publik pada pemerintah. Keterlibatan publik yang tinggi bisa menciptakan pemerintahan desa yang demokratis yang berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat mendongkrak potensi yang melekat pada penduduk desa. Hal tersebut sesuai dengan temuan penelitian Kassa et al. (2019), yang menemukan bahwa kinerja pemerintah desa dipengaruhi oleh keterlibatan publik.

H4 : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Desa Sidobinangun

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk studi kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sidobinangun dan perangkat desa guna mendapatkan informasi yang akurat, valid dan *reliable*. Variabel yang ditetapkan oleh peneliti diantaranya: variabel independen, yaitu Akuntabilitas (X1), Kompetensi (X2), Pengendalian Internal (X3), dan Partisipasi Masyarakat (X4) serta variabel untuk dependen merupakan Kinerja Pemerintah Desa (Y). Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sidobinangun, Kabupaten Lamongan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling*. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Studi ini mengambil data dengan cara membagikan kuisioner kepada masyarakat Desa Sidobinangun, Kabupaten Lamongan. Kuisioner diberikan sebanyak 93 kepada masyarakat Desa Sidobinangun, Kabupaten Lamongan untuk menilai kinerja pemerintah desa Sidobinangun. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square (PLS)* dengan *software SmartPLS 3*. Penggunaan PLS sebagai teknik analisis memiliki kelebihan seperti dapat digunakan pada jumlah sampel kecil, hasil tetap kuat walaupun terdapat data *noise* dan data *missing*, tidak mensyaratkan data terdistribusi normal dan dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda.

HASIL PENELITIAN

Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Tujuan validitas konvergen ialah untuk menilai seberapa asli hubungan yang ada antara variabel. Menurut undang-undang yang berlaku, data dianggap dapat diterima jika validitas konvergen model pengukuran dengan indikator dievaluasi dengan merujuk pada korelasi antara nilai indikator dan nilai konstruk lebih tinggi dari 0,7 (Ghozali, 2021:68). Berdasarkan pengolahan data awal dengan SmartPLS 4.0 diperoleh hasil uji validitas konvergen untuk variabel Akuntabilitas, Kompetensi, dan Partisipasi Publik. Semua indikator untuk variabel tersebut valid ($>0,70$), namun pada variabel Pengendalian Intern ada 2 indikator yang tidak valid yakni X3.2 dan X3.3, sedangkan sisanya valid ($>0,7$). Terdapat Dua indikator berwarna merah memperlihatkan nilai loading di bawah 0,70 berdasarkan langkah awal pengolahan data. Hal ini memperlihatkan bahwa indikator tersebut perlu dihilangkan sebab tidak mencukupi kriteria batas pengukuran minimum, setelah itu dilaksanakan uji validitas konvergen kembali dengan memakai outer loading tahap kedua. Hasil dari variabel Akuntabilitas, Kompetensi, Pengendalian Intern, dan Partisipasi Publik semuanya valid ($>0,70$) berdasarkan pengolahan data tahap kedua dengan SmartPLS 3.

Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Memeriksa nilai akar kuadrat dari rata-rata varians yang diekstrak (AVE) untuk masing-masing konstruk dengan korelasi dengan konstruk lainnya, dimungkinkan untuk menguji validitas diskriminan. Apabila nilai AVE $> 0,50$ maka dapat dianggap nilai discriminant validity sangat baik (Ghozali, 2021:68). Nilai AVE $> 0,50$ ditemukan untuk setiap konstruksi berdasarkan pengolahan data. Kompetensi mempunyai nilai AVE senilai 0,576, sedangkan akuntabilitas mempunyai nilai AVE senilai 0,568. Nilai AVE untuk pengendalian internal 0,648, partisipasi publik 0,596, dan kinerja pemerintah desa

0,691. Oleh sebab itu, dapat dianggap bahwa semua konstruksi mempunyai nilai AVE di atas 0,50 dan semua variabel konstruksi mempunyai nilai AVE yang tinggi.

Tabel 2.
Uji Reliabilitas Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability (rho_a)</i>	<i>Composite Reliability (rho_c)</i>
	0.813	0.815	0.870
Kompetensi (X2)	0.825	0.827	0.877
Pengendalian Internal (X3)	0.733	0.734	0.849
Partisipasi Masyarakat (X4)	0.837	0.838	0.885
Kinerja Pemerintah Desa (Y)	0.883	0.883	0.914

Bahwa hasil pengujian composite reliability menunjukkan nilai $>0,7$ dan cronbach's alpha $>0,7$ yang artinya semua variabel dinyatakan reliabel.

Tabel 3.
Nilai R-Square

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Kinerja Pemerintah Desa	0,756	0,745

Bahwa nilai R-Square Adjusted variabel kinerja pemerintah desa senilai 0,745 memperlihatkan bahwa variabel kinerja pemerintah desa tergolong kuat atau baik. sebab variabel laten akuntabilitas, kompetensi, pengendalian intern, dan partisipasi publik dapat menjelaskan atau memprediksi 74,5% kinerja pemerintah desa, maka sisanya dipaparkan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti variabel budaya organisasi. Keberhasilan sebuah organisasi dalam menerapkan unsur-unsur ataupun berbagai nilai budaya organisasinya bisa mendukung organisasi untuk tumbuh serta berkembang dengan berkesinambungan, menurut Hadju et al. (2019). Variabel budaya organisasi dianggap sebagai faktor penentu utama dalam keberhasilan kinerja organisasi.

Tabel 4.
Nilai Q-Square

	<i>Q-Square</i>
Kinerja Pemerintah Desa	0,509

Berdasarkan hasil dari pengujian predictive relevance pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai Q^2 secara keseluruhan menunjukkan nilai 0,509, maka dapat disimpulkan variabel akuntabilitas, kompetensi, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat memiliki relevansi prediktif terhadap variabel kinerja pemerintah desa.

Tabel 5.
Uji Hipotesis Berdasarkan Total Effects

	Original Sample (O)	Sample Man (M)	Standard Deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P value s
X1 -> Y	0.235	0.232	0.117	2.018	0.044
X2 -> Y	0.221	0.225	0.086	2.578	0.010
X3 -> Y	0.064	0.065	0.109	0.590	0.555
X4 -> Y	0.453	0.453	0.102	4.456	0.000

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan hasil uji hipotesis yang dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Desa sebesar 0,235 dan t-statistik sebesar 2,018 dengan p-value 0,044 sehingga Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Sidobinangun, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan diterima. 2) Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Desa sebesar 0,221 dan t-statistik yaitu sebesar 2,578, dengan p-value 0,010 sehingga Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Sidobinangun, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan diterima. 3) Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Desa sebesar 0,064 dan t-statistik yaitu sebesar 0,590, dengan p-value 0.555 sehingga Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Sidobinangun, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan ditolak. 4) Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Desa sebesar 0,435 dan t-statistik yaitu sebesar 4,456, dengan p-value 0,000 sehingga Partisipasi Masyarakat berengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Desa Sidobinangun, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan diterima.

PEMBAHASAN

Kinerja pemerintah desa Sidobinangun, Kabupaten Lamongan menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terbukti nilai rata-rata jawaban responden 70% pada skala setuju dan sangat setuju dalam menilai kinerja pemerintah desa Sidobinangun sudah sangat baik dan sisanya masih terdapat yang kurang setuju bahkan tidak setuju pada pernyataan yang menyatakan kinerja pemerintah desa sudah baik. Hasil penyebaran kuesioner pada 93 responden masyarakat Desa Sidobinangun yang menjadi objek dalam penelitian ini rata-rata responden memiliki usia di 21-30 tahun yang mana di umur tersebut masih memiliki jiwa kritis yang cukup besar dan juga responden rata-rata berpendidikan SMA/ sederajat sebesar 53%, D3 7%, S1 38%, dan S2 2%, yang artinya pendidikan di desa Sidobinangun ini masih diutamakan. Menurut ungkapan beberapa masyarakat hal tersebut dikarenakan masyarakat yang berpendidikan memiliki pemikiran dan pengetahuan yang jauh lebih luas untuk memajukan desanya. Hasil yang sangat baik ini dikarenakan pemerintah aparaturnya desa Sidobinangun sudah dianggap masyarakat desa Sidobinangun bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat

dan juga sudah dianggap dapat mensejahterakan masyarakat melalui program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Sidobinangun untuk membangun masyarakat desa yang sehat, aman, makmur dan sejahtera.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja pemerintah desa Sidobinangun ditingkatkan melalui akuntabilitas. sebab setiap organisasi pemerintahan didesak untuk bertanggungjawab laporan keuangan ataupun laporan kinerja dengan dapat menjelaskan secara tuntas sesuai dengan hasil program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, hal ini memperlihatkan bahwa sistem pertanggungjawaban pemerintah desa Sidobinangun yang lebih baik mengarah pada peningkatan kinerja. Setiap upaya perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dilaksanakan agar dapat mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif. Kinerja pemerintah desa Sidobinangun ditingkatkan melalui akuntabilitas. sebab setiap organisasi pemerintahan didesak untuk bertanggungjawab laporan keuangan maupun laporan kinerja dengan mampu menjelaskan secara tuntas sesuai dengan hasil program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, hal ini memperlihatkan bahwa sistem pertanggungjawaban pemerintah desa Sidobinangun yang lebih baik mengarah pada peningkatan kinerja. Setiap upaya perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dilaksanakan agar dapat mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif.

Akuntabilitas publik, menurut Mardiasmo (2021), ialah kewajiban pemberi (principal) dalam mempertanggungjawabkan, menyediakan, melaporkan, dan menyampaikan setiap tindakan serta kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemegang amanah (agen). Akuntabilitas publik dapat mendorong kinerja sebab aparatur di pemerintahan desa akan merasa lebih bertanggung jawab dan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan tugasnya dengan benar sehingga dapat memberikan kinerja terbaik jika didesak untuk bertanggungjawab segala tindakan dan kegiatannya. Gagasan tanggung jawab bukanlah hal baru di Indonesia; hampir semua organisasi dan lembaga pemerintah sangat menekankan hal ini, utamanya saat menjalankan tugas administrasi. Kejadian ini yakni akibat dari bangkitnya kembali tuntutan publik yang disinyalir pada awal fase reformasi tahun 1998. Tuntutan publik tersebut berkembang akibat ketidakmampuan era Orde Baru dalam menerapkan konsep akuntabilitas secara berkesinambungan di seluruh kanal pemerintahan, yang nantinya memberikan kontribusi terhadap kelemahan birokrasi dan memicu lahirnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan administrasi negara dan keuangan Indonesia (Haryono et al., 2013). Gagasan tanggung jawab bukanlah hal baru di Indonesia; hampir semua organisasi dan lembaga pemerintah sangat menekankan hal ini, utamanya saat menjalankan tugas administrasi. Kejadian ini yakni akibat dari bangkitnya kembali tuntutan publik yang disinyalir pada awal fase reformasi tahun 1998. Tuntutan publik tersebut berkembang akibat ketidakmampuan era Orde Baru dalam menerapkan konsep akuntabilitas secara rutin di seluruh lini pemerintahan, yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap kelemahan birokrasi dan memicu lahirnya beragam penyimpangan dalam manajemen ketatanegaraan dan keuangan negara di Indonesia (Haryono et al, 2013).

Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Temuan analisis memperlihatkan bahwa kompetensi berdampak pada seberapa baik kinerja pemerintah desa Sidobinangun. Hal ini memperlihatkan bahwa jika aparat desa di Desa Sidobinangun terus meningkatkan kompetensinya maka kinerjanya akan

meningkat. Efisiensi aparat desa dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya utamanya ditentukan oleh kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Aparatur desa dapat lebih terkendali serta mampu menjalankan tugas serta pekerjaan yang relevan dengan job description yang sudah ditentukan berkat kompetensi yang kian sesuai dan sejalan dengan pekerjaan sehingga meningkatkan taraf kinerja. Hal ini sesuai dengan Stewardship theory yang menyoroti pemerintahan desa sebagai institusi lokal yang dapat menyediakan pelayanan yang baik bagi publik. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan sumber daya manusia yang baik serta bermutu agar dapat memaksimalkan kesejahteraan publik (Heni Haryanti, 2016).

Pengetahuan diperoleh melalui pendidikan formal, maupun melalui pelatihan ataupun kursus yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakannya. Keterampilan, seperti pengetahuan terkait pekerjaan yang mereka lakukan dan kemampuan mengelolanya secara mendalam. Mereka juga perlu mampu bertindak cerdas untuk menyelesaikan masalah dan menyelesaikan tugas dengan cepat dan efektif. Menurut wawancara peneliti, mayoritas aparat Pemerintah Desa Sidobinangun hanya berpendidikan SLTA, namun jika dilihat dari masa kerja aparat rata-rata 4-6 tahun bahkan > 10 tahun. Pengalaman kerja bisa menunjukkan tingkat pemahaman pengetahuan serta keterampilan seorang individu dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga pengalaman kerja bisa menjadi rujukan dalam mengevaluasi kinerja pegawai. Pengalaman kerja ini dapat dijadikan sebagai faktor penting dalam mendeskripsikan luasnya pengetahuan serta keterampilan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas di pemerintahan desa. Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian Ajijah et al. (2021) yang memperoleh hasil bahwa komunikasi dan kompetensi meningkatkan kinerja aparat desa di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Temuan penelitian Hermawan (2019) yang memperlihatkan bagaimana kompetensi berpengaruh terhadap kinerja aparat sipil negara dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan tambahan dukungan untuk penelitian ini.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Hasil analisis memperlihatkan bahwa pengendalian intern tidak berdampak pada efektivitas pemerintahan desa Sidobinangun. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan staf Pemerintah Desa Sidobinangun dan sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga sulit bagi pemerintah untuk menerapkan sistem pengendalian intern yang efisien. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa aparat desa hanyalah pelaksana yang menjalankan tugas yang diberikan. Tim manajemen puncak yang bertanggung jawab menerapkan prosedur pengendalian internal tidak termasuk otoritas desa. Teori harapan yang diberikan oleh Vroom (1964) dalam Wahyudi (2017) yang menyatakan bahwa apabila seorang aparat desa menginginkan suatu hal dan mempunyai harapan yang cukup tinggi untuk mendapatkannya, maka dia akan terdorong untuk mendapatkannya, dibenarkan oleh temuan studi. Penegasan tersebut di atas memperlihatkan adanya perterkaitan terhadap gagasan kepengurusan, yang menyatakan bahwa kepala desa dan aparat desa berfungsi sebagai pelayan dan bekerja untuk kepentingan umum dengan mengerahkan semua sumber daya mereka untuk memastikan kontrol internal berhasil. Upaya ini untuk memberikan kepastian bahwa operasi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, sehingga lebih mudah untuk mencapai kinerja yang lebih baik dengan pengembangan pengendalian internal yang sangat baik (Donaldson & Davis dalam Devi et al., 2020).

Berdasarkan frekuensi tanggapan responden yang menjawab setuju hingga sangat setuju, indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian sudah dilaksanakan dengan baik, namun hal tersebut tidak berdampak pada kinerja aparat desa. Masalah yang mendasarinya ialah aparat desa hanya akan memperhatikan apa yang dilaksanakan dan dibebankan daripada bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengendalian intern. Ketiadaan sumber daya manusia yakni faktor kedua yang membuat kinerja pemerintah desa tidak terpengaruh oleh mekanisme kontrol internal. Kompetensi pemerintah desa menurut Aulia et al (2018), akan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan uang kepada pemerintah desa. Kriteria pertama agar aparat desa dapat berfungsi dengan baik dalam kapasitasnya sebagai pengelola keuangan desa ialah kompetensinya. Akibat desentralisasi fiskal yang diberikan kepada pemerintahan desa oleh pemerintah pusat dan daerah, diperlukan persiapan yang salah satunya ialah kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas.

Temuan penelitian ini berkaitan dengan penelitian Utama (2020), yang menemukan bahwa pengendalian internal meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah secara signifikan. Namun temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyudi (2019) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berdampak pada efektivitas pengelolaan perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa.

Pengaruh Partisipasi Publik terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja pemerintahan desa Sidobinangun diakui dipengaruhi oleh partisipasi publik, menurut temuan analisis. Hal ini memperlihatkan betapa kesadaran publik akan kebutuhan untuk terlibat dalam urusan pemerintahan desa. Keterlibatan publik pada hakekatnya ialah sebuah tindakan yang bekerja untuk memastikan bahwa sebuah tugas diselesaikan sesuai dengan rencana atau hasil yang diharapkan. sebab pelibatan publik dan kinerja sangat erat kaitannya, maka penting dilaksanakan secara efektif di Desa Sidobinangun, Kecamatan Deket, dan Kabupaten Lamongan untuk memotivasi pekerja, mengarahkan mereka untuk fokus pada kualitas, memanfaatkan waktu dan sumber daya yang tersedia, dan pada akhirnya mengembangkan kinerja pekerja. Evaluasi proses kerja didasarkan pada partisipasi untuk mencapai kinerja karyawan yang efektif dan efisien. Dalam penelitian ini kedua pihak yang dimaksud ialah pemerintah desa dan penduduk desa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yakni kesejahteraan dan keberhasilan bersama, sesuai dengan Stewardship theory yang menerapkan individu mempunyai hubungan kesepakatan dengan organisasinya yang merepresentasikan sebuah komitmen moral dan mengikat kedua belah pihak untuk bekerja menuju tujuan bersama tanpa saling mengambil keuntungan (Raharjo, 2014). "Berpartisipasi" dalam pengambilan keputusan yang demokratis, mengakui hak asasi manusia, mengizinkan kebebasan berekspresi dan pers, dan mengizinkan atau mengakomodasi ambisi orang ialah contoh partisipasi. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardiyanti, (2021) yang menemukan bahwa keterlibatan publik berdampak pada kinerja pemerintah desa Panglungan, dan Wahyudi, (2017), yang menemukan bahwa keterlibatan meningkatkan kinerja aparat desa.

SIMPULAN

Bahwa kinerja pemerintah desa Sidobinangun sangat membutuhkan tingkat akuntabilitas, kompetensi yang tinggi dari aparat desa Sidobinangun dan juga didukung oleh tingginya peran masyarakat Sidobinangun, namun pengendalian internal

belum memiliki kontribusi yang optimal terhadap kinerja pemerintah desa Sidobinangun. Saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya yang terkait kinerja pemerintah desa, disarankan untuk menambah variabel lainnya yang jarang diteliti sebagai variabel independent, misalnya budaya organisasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang meluas, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambah jumlah populasi sampel penelitian, misalnya pada Kabupaten. Penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu Terdapat kemungkinan responden menjawab secara asal-asalan dalam kuesioner yang sudah diberikan peneliti, Masih banyak responden yang memerlukan waktu lama dalam memahami kuesioner yang diberikan peneliti, Adanya perbedaan persepsi antar masing-masing responden dalam memahami konteks pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan peneliti dan kendala yang bersifat situasional, yaitu berupa situasi yang dirasakan responden pada saat pengisian kuesioner sehingga dapat mempengaruhi jawaban responden yang memungkinkan jawaban tersebut tidak sesuai dengan apa yang dirasakan responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Deki Putra. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi, 1 No.1*, 1–23. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/85>
- Haryono, Haryono, Budiyono Budiyono, Istyarini Istyarini, Wardi Wardi, and Apri Ardiantoro. 2019. “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang”. *Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran 1 (1)*, 17-22. <https://doi.org/10.15294/panjar.v1i1.28463>.
- Hadju, L., & Adam, N. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango. Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 6(2)*, 125–135. <https://doi.org/10.37606/Publik.V6i2.14>
- Heni Haryanti, M. N. A. (2016). Tuntutan Masyarakat Ini Muncul Karena Pada Masa Orde Baru Konsep Akuntabilitas Tidak Mampu Diterapkan Secara Konsisten Di Setiap Lini Kepemerintahan Yang Pada Akhirnya Menjadi Salah Satu Penyebab Lemahnya Birokrasi Dan Menjadi Pemicu Munculnya Berbagai Penyimpangan-Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Administrasi Negara Di Indonesia. *Jurnal Nominal (Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen)*. <http://repository.unisbablitar.ac.id/288/>
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti, 7(2)*, 231–246. <https://doi.org/10.25105/Jat.V7i2.7446>
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi 1)*. Andi Offset.
- Ramandei, P. (2009). “Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/7895/>
- Rizal, H. (2019). Peran Komitmen Organisasi Memediasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal*

